

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan, akuntansi sosial telah menjadi alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari aktivitas mereka. Konsep akuntansi sosial yang diperkenalkan oleh Gray telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran akuntansi. Gray menggambarkan hubungan antara akuntansi sosial dan keberlanjutan sosial sebagai suatu integrasi yang penting dalam praktik akuntansi modern. Dalam pandangannya, akuntansi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari aktivitas perusahaan, yang merupakan aspek krusial dalam mencapai keberlanjutan. Akuntansi tidak hanya sebatas menghitung transaksi finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas untuk mencerminkan interaksi antara organisasi dan lingkungan sosialnya (Gray, 2008). Pendekatan ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan semua aspek tersebut dalam strategi bisnis mereka, sehingga menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, akuntansi sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam perilaku perusahaan. Pelaporan akuntansi sosial harus mencakup informasi yang relevan bagi semua *stakeholder*, termasuk masyarakat, karyawan, dan pemerintah. Ini mengarah pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu organisasi membangun reputasi yang baik,

meningkatkan kepercayaan *stakeholder* serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sustainable Development Goals (SDGs) diadopsi oleh PBB dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Untuk mencapai dunia yang lebih adil dan berkelanjutan, PBB telah menetapkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang saling terkait. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat penting dalam mengatasi tantangan keberlanjutan dan berbagai masalah baru yang dihadapi umat manusia, dan perhatian pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong keberhasilan implementasinya. Tujuan utama dari pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia.

Dunia yang dilanda kemiskinan dan ketidakadilan cenderung lebih rentan terhadap krisis lingkungan dan masalah lainnya. Salah satu akibat dari krisis yang terjadi adalah tindak kejahatan (Koçak dkk, 2019). Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi tidak sebanding dengan penciptaan lapangan pekerjaan berpotensi menyebabkan lonjakan angka kriminalitas. Kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan adalah gejala dari penyakit sosial yang lebih luas (Hachica & Triania, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penciptaan lapangan kerja, penegakan hukum yang adil, serta upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, pemerintah telah menetapkan sasaran nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2024 yang selaras dengan tujuan global SDGs 2030. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi, SDGs merancang pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui empat

strategi: pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perpres 111 memberikan panduan yang lebih luas tentang pembangunan berkelanjutan, sehingga program pemasyarakatan dapat lebih fokus pada pengembangan manusia dan melibatkan berbagai pihak.

Pekerjaan yang layak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 8 yang berfokus pada "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi." Tujuan ini mencakup penciptaan lapangan kerja yang produktif, perlindungan hak-hak pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu, SDGs 8 mendorong kesetaraan gender di pasar tenaga kerja, penghapusan kerja paksa dan perdagangan manusia, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kewirausahaan. Pendidikan dan pelatihan yang relevan juga penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan industri.

Pemberdayaan merupakan proses yang mendukung kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam mencapai potensi maksimal mereka (Ife, 2019). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah serta perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tujuan dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sistem pemasyarakatan adalah suatu kerangka yang berlandaskan Pancasila, yang menentukan arah dan batasan serta metode pembinaan narapidana. Sistem ini diterapkan secara terpadu oleh para pembina, narapidana, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Sistem

pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui berbagai program pembinaan, diharapkan narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Oktaviani & Putri, 2024).

Lembaga Pemasyarakatan, yang sering dikenal dengan sebutan Lapas, adalah tempat di mana para narapidana mendapatkan pembinaan. Sementara itu, narapidana adalah narapidana, anak didik, dan klien lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari Lapas adalah rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan secara efektif menerapkan sistem pembinaan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk merubah perilaku dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan, sesuai dengan tujuan akhir dari proses hukum (Febriana, 2013). Pelayanan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya merupakan perlakuan terhadap individu yang menjalani hukuman penjara, dengan tujuan untuk menumbuhkan dalam diri mereka keinginan untuk hidup sesuai dengan hukum dan memenuhi kebutuhan diri mereka setelah bebas (Fachrezi & Wibowo, 2020).

Akuntansi sosial berperan penting dalam memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya memenuhi tujuan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas. Dengan mengukur dampak sosial dari program pembinaan, lapas dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mendukung rehabilitasi narapidana dan mengurangi angka residivisme (Ditjenpas, 2021). Melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian, narapidana dilatih untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan keterampilan agar siap kembali ke masyarakat. Kegiatan industri di lapas merupakan upaya konkret untuk memberikan keterampilan kerja yang dibutuhkan,

sehingga narapidana dapat menghasilkan produk bernilai ekonomis dan menumbuhkan rasa percaya diri. Namun, mantan narapidana sering menghadapi stigma negatif dari masyarakat, terutama yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah (Rohman & Komara, 2024). Stigma ini menyulitkan mereka untuk diterima kembali, terutama dalam dunia kerja, dan dapat mendorong mereka kembali ke jalur kriminal. Masyarakat cenderung lebih fokus pada kesalahan masa lalu daripada memberikan dukungan dan kesempatan kedua, padahal dengan dukungan yang tepat, mantan narapidana berpotensi menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas adalah Lapas yang melebihi kapasitas (*overcapacity*). *Overcapacity* di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia berdampak negatif terhadap program pelatihan kerja narapidana (Darwin, 2019). Program pelatihan kerja juga terhambat oleh fasilitas yang tidak memadai, menyulitkan narapidana untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan layak setelah bebas. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas lapas dan mendukung rehabilitasi narapidana.

Berdasarkan data dari Seksi Registrasi Lapas Kelas 1 Makassar, diketahui bahwa total penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sebanyak 1.322 orang, dengan jumlah tahanan sebanyak 107 orang, sedangkan jumlah narapidana sebanyak 1.215 orang yang harusnya kapasitasnya hanya sebanyak 740 orang. Hal ini mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sedang mengalami *overcapacity* sebanyak 582 orang dengan persentase sebesar 78,38%. Masalah *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki dampak luas yang tidak hanya mempengaruhi WBP tetapi juga sistem peradilan secara keseluruhan hingga dapat menghambat pencapaian SDGs.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi SDGs di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs): Operasionalisasi Akuntansi Sosial”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya implementasi SDGs di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam operasionalisasi akuntansi sosial?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam mengimplementasikan program SDGs serta mengoperasionalisasikan akuntansi sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya implementasi SDGs dalam operasionalisasi akuntansi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam mengimplementasikan program SDGs serta mengoperasionalisasikan akuntansi sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian lingkup Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya akuntansi serta dapat menjadi referensi rujukan untuk penelitian selanjutnya

mengenai *Sustainable Development Goals* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam implementasi SDGs, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, penelitian dirancang sebagai instrumen pengetahuan yang memberdayakan, memberikan wawasan komprehensif tentang SDGs khususnya pada masyarakat yang belum mengetahui konteks SDGs.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan langkah maju dalam evolusi akuntansi. Dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan, akuntansi sosial dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera (Bergant, 2021). Gray mendefinisikan akuntansi sosial sebagai proses pengukuran, pengumpulan, dan pelaporan informasi yang berkaitan dengan dampak sosial dari kegiatan organisasi. Ini mencakup identifikasi dan evaluasi biaya serta manfaat sosial yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan (organisasi).

Akuntansi sosial bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja organisasi, tidak hanya dari perspektif finansial, tetapi juga dari perspektif sosial dan lingkungan. Melalui akuntansi sosial, organisasi dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada publik mengenai kontribusi sosial mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas organisasi, tetapi juga memungkinkan *stakeholder* seperti investor, pelanggan, dan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Selain itu, akuntansi sosial juga memfasilitasi pengukuran kinerja program-program sosial organisasi, sehingga memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat.

Akuntansi sosial adalah metode yang mengukur nilai sosial-ekonomi dari aktivitas organisasi, baik nirlaba maupun laba, melalui integrasi analisis keuangan dan sosial. Konsep ini menekankan bahwa nilai sosial bukan hanya milik organisasi nirlaba, tetapi juga dapat dihasilkan oleh perusahaan laba yang berkomitmen pada

misi sosial (contoh: The Body Shop, Ben & Jerry's). Tujuannya adalah memberikan gambaran holistik tentang dampak program, termasuk outcome non-finansial seperti pemberdayaan masyarakat dan penurunan ketergantungan pada bantuan pemerintah (Quarter dkk, 2001).

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi sosial membawa sejumlah manfaat strategis bagi organisasi. Dengan mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis, akuntansi sosial meningkatkan transparansi organisasi, memastikan akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh berbagai *stakeholder*. Selain itu, akuntansi sosial juga mendorong organisasi untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk serta layanan yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Gray, 2008).

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam merehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, efektivitas program pembinaan di lapas seringkali sulit diukur hanya dengan metrik keuangan. Akuntansi sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari program-program pembinaan di lapas.

Akuntansi sosial memainkan peran penting dalam konteks pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui akuntansi sosial, lapas dapat menunjukkan kepada publik bagaimana sumber daya yang ada digunakan untuk merehabilitasi narapidana. Selain itu, akuntansi sosial memungkinkan lapas untuk mengukur efektivitas program-program pembinaan dalam mencapai tujuan rehabilitasi, seperti penurunan tingkat residivisme dan peningkatan keterampilan narapidana. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi sosial juga membantu lapas dalam membuat

keputusan strategis yang lebih baik terkait dengan program-program pembinaan. Selanjutnya, dengan melaporkan dampak sosial secara transparan, lapas dapat membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga narapidana, yang pada akhirnya mendukung proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Akuntansi sosial memainkan peran yang signifikan dalam membantu narapidana mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Keterampilan hidup adalah kemampuan adaptif dan positif yang memungkinkan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif. Selain itu, akuntansi sosial dapat memainkan peran yang krusial dalam membantu narapidana mengembangkan keterampilan kerja yang berorientasi pada inovasi. Di era digital dan ekonomi kreatif, keterampilan inovatif sangat penting untuk keberhasilan di pasar kerja. Akuntansi sosial, dalam konteks ini, tidak hanya mengukur keberhasilan program pelatihan kerja, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Akuntansi sosial di lapas mengukur dampak pada berbagai aspek, dimulai dari perubahan yang terjadi pada narapidana itu sendiri. Aspek ini meliputi peningkatan keterampilan dan pengetahuan, perubahan perilaku dan sikap, peningkatan kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan peluang kerja setelah bebas, dan yang paling penting, penurunan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Selain itu, dampak yang lebih luas juga diukur, yaitu dampak pada masyarakat, yang mencakup penurunan tingkat kejahatan, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kesadaran hukum, dan kontribusi ekonomi dari narapidana yang telah bebas.

Penelitian Fred Braun Jr. tentang rehabilitasi narapidana melalui pelatihan kerja memiliki relevansi kuat dengan program pembinaan di Lapas Makassar, khususnya dalam hal tujuan pengurangan residivisme dan reintegrasi sosial. Seperti Braun yang mendirikan bisnis riil (Zephyr, Heatron, Henke) untuk melatih narapidana, Lapas Makassar dapat mengembangkan unit produksi garmen sebagai simulasi lingkungan kerja nyata. Strategi ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan praktis, tetapi juga memfasilitasi tabungan pasca-bebas—sebagaimana Braun memaksa narapidana menyisihkan pendapatan—sebagai modal usaha. Kemitraan dengan sektor swasta, seperti Workman Fund milik Braun, juga dapat diadopsi dengan melibatkan industri tekstil lokal untuk penyerapan tenaga kerja. Pengukuran dampak sosial melalui metode akuntansi sosial (Richmond, 1999) menjadi kunci untuk menilai keberhasilan program, misalnya menghitung penurunan residivisme, pendapatan peserta, dan penghematan anggaran pemerintah. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana, stigma masyarakat, dan kebutuhan pemantauan jangka panjang mengharuskan kolaborasi multisektor antara pemerintah, NGO, dan industri. Rekomendasi konkret meliputi pelatihan kewirausahaan serta insentif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana.

Akuntansi sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembinaan kemandirian di Lapas, khususnya dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi akuntansi sosial dimulai dengan mengidentifikasi keterampilan yang relevan dengan SDGs 8, melalui analisis kebutuhan pasar kerja berkelanjutan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan prioritas keterampilan yang memberikan peluang kerja layak bagi narapidana setelah bebas. Selanjutnya, program pelatihan yang efektif dirancang dengan pembelajaran berbasis

kompetensi, integrasi prinsip-prinsip SDGs 8 ke dalam kurikulum, dan pengembangan keterampilan lunak. Dampak pelatihan diukur dan dievaluasi menggunakan indikator kinerja yang relevan, pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang mendalam. Hasilnya dikomunikasikan melalui laporan akuntansi sosial yang transparan, umpan balik dari pemangku kepentingan, dan budaya pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi sosial memastikan bahwa program pelatihan relevan, efektif, dan berkontribusi pada reintegrasi narapidana serta pembangunan berkelanjutan.

2.1.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan generasi kini dan mendatang. Konsep ini diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1987 melalui laporan "Our Common Future". Pentingnya mencapai keseimbangan antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan ditekankan dalam laporan ini. Pembangunan berkelanjutan telah melalui tiga tahap: masa awal (sebelum 1972), pendirian (1972-1987), dan pengembangan (1987-sekarang). Dari gagasan awal yang samar-samar menjadi pemahaman praktis yang terus berkembang, pembangunan berkelanjutan telah secara progresif dimasukkan ke dalam aktivitas global.

Secara umum, pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai tanda suatu negara yang bergerak maju, baik dari segi struktur sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang saling terkait, yaitu:

1. Aspek Ekonomi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya

alam merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karakteristiknya meliputi fokus pada efisiensi dan produktivitas, mendorong inovasi dan diversifikasi, meningkatkan daya saing, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.

2. Aspek sosial: Pembangunan berkelanjutan sosial diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Prinsip utamanya mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, penghargaan terhadap keragaman budaya, partisipasi aktif masyarakat, penghapusan diskriminasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dan perlindungan sosial.
3. Aspek lingkungan hidup: Pembangunan berkelanjutan lingkungan difokuskan pada upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Strategi pendekatannya meliputi pencegahan kerusakan lingkungan, mitigasi dampak lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, restorasi ekosistem, konservasi sumber daya alam, pengelolaan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami evolusi dari fokus awal pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju tujuan yang lebih luas dan inklusif seperti pengentasan kemiskinan (MDGs) dan pencapaian kesejahteraan global (SDGs). Secara historis, pembangunan berkelanjutan pada tahap awal lebih berfokus pada dimensi lingkungan.

2.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber: <https://ar.inspiredpencil.com/pictures-2023/sustainable-development-projects-for-students>

Transisi dari MDGs ke SDGs menandai babak baru dalam pembangunan global, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Prinsip “*no one leave behind*” menjadi landasan utama dalam kesepakatan global yang melibatkan 169 negara untuk mencapai SDGs pada tahun 2015. *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup 17 tujuan yang saling terkait untuk mengatasi berbagai tantangan global.

Tabel 2.1 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No.	Tujuan SDGs	Penjelasan singkat
1	Tanpa kemiskinan	Mengakhiri kemiskinan global.
2	Tanpa kelaparan	Mengatasi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan.
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan universal.
4	Pendidikan berkualitas	Memberikan pendidikan berkualitas dan inklusif.
5	Kesetaraan gender	Menciptakan kesetaraan gender melalui penguatan kapasitas perempuan.
6	Air bersih dan sanitasi layak	Menjamin ketersediaan air dan sanitasi berkelanjutan.
7	Energi bersih dan terjangkau	Memastikan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan kontemporer untuk semua orang.

8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesempatan kerja.
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Mengoptimalkan pengembangan infrastruktur dan inovasi industri.
10	Mengurangi kesenjangan	Mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara.
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Membuat kota dan permukiman yang dihuni oleh manusia ramah, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Memastikan pola produksi dan konsumsi berlangsung secara berkelanjutan.
13	Penanganan perubahan iklim	Mengambil tindakan segera untuk memerangi dampak perubahan iklim.
14	Ekosistem lautan	Konservasi dan pelestarian sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.
15	Ekosistem daratan	Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan.
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Mewujudkan masyarakat damai dan sistem kelembagaan berkualitas.
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Memperkuat infrastruktur kolaborasi global dalam pembangunan.

Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals>

Tujuan yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Kemiskinan, baik itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (kemiskinan absolut) maupun kondisi di mana seseorang memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dibandingkan orang lain (kemiskinan relatif), merupakan masalah global yang serius. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan (Raphael, 2013). Oleh karena itu,

upaya untuk memberantas kemiskinan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Tujuan yang kedua adalah tanpa kelaparan. Selain masalah kemiskinan, masalah kekurangan pangan dan gizi buruk juga menjadi fokus utama. Kelaparan tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti konflik, bencana alam, dan perubahan iklim. Kekurangan gizi yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari gangguan pertumbuhan hingga kematian (Behrman dkk., 2004). Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan, memperbaiki gizi masyarakat, serta mengatasi akar penyebab kelaparan.

Tujuan yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Kesehatan bukan hanya sekadar tidak sakit, melainkan mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang optimal (Salomon dkk., 2003). Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia, mulai dari bayi hingga lansia. Dengan mencapai tujuan ini, diharapkan setiap individu dapat hidup produktif dan bahagia, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Tujuan yang keempat adalah pendidikan berkualitas. Pendidikan bukan hanya hak dasar manusia, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu negara (Du Preez, 2012). Pendidikan yang berkualitas akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensi mereka, memperoleh pekerjaan yang layak, serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948). Tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan sepanjang hayat agar semua orang dapat memperoleh manfaatnya.

Tujuan yang kelima adalah kesetaraan gender. Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan (Lorber,

2001). Ketimpangan gender ini membatasi potensi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, tujuan kelima SDGs berupaya untuk menciptakan dunia yang adil di mana semua orang, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama. Tujuan yang keenam adalah air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi yang baik adalah hak dasar yang penting untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup (Tortajada & Biswas, 2018). Kenyataannya, masih banyak orang di dunia, terutama di negara berkembang, yang tidak memiliki akses terhadap layanan dasar ini. Kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, tujuan keenam SDGs bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.

Tujuan yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Energi adalah kebutuhan fundamental bagi manusia yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menangani isu perubahan iklim (Nussbaumer dkk., 2012). Sayangnya, masih banyak masyarakat, terutama di negara berkembang, yang belum memiliki akses terhadap energi yang memadai. Tujuan ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memastikan semua orang dapat menikmati manfaat energi bersih dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Tujuan yang kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan tidak hanya memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memberikan makna dan tujuan hidup bagi setiap individu (Frey & MacNaughton, 2016). Selain itu, pekerjaan yang layak juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (ILO, 2020). Tujuan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, sehingga dapat menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, tujuan ini ingin memastikan bahwa setiap orang berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpartisipasi pada pertumbuhan ekonomi termasuk bagi WBP yang sedang mendekam di Lapas.

Tujuan yang kesembilan adalah industri, inovasi dan infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan sistem energi sangat penting untuk mendorong perkembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi dinamika lingkungan dan bencana (Hallegatte dkk., 2019). Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya mengembangkan industri yang ramah lingkungan dan mendorong inovasi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi berbagai masalah global. Tujuan yang kesepuluh adalah mengurangi kesenjangan. Kesenjangan ini bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti pendapatan, kekayaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peluang untuk maju dalam kehidupan. Kesenjangan yang besar dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan (Oestreich, 2018). Tujuan ini bertujuan untuk mengupayakan pemerataan akses kesejahteraan dalam kerangka keadilan sosial.

Tujuan yang kesebelas adalah kota dan permukiman yang berkelanjutan. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kota seperti ini efisien dalam menggunakan sumber daya, memiliki infrastruktur yang ramah lingkungan, serta dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya (Joss, 2015). Tujuan ini bertujuan untuk membangun kota-kota yang dapat mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, kepadatan penduduk, dan kesenjangan sosial,

sehingga memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang (Martos dkk., 2016). Tujuan yang kedua belas adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini berarti generasi saat ini harus mengubah cara kita menghasilkan dan menggunakan barang serta jasa. Tujuannya adalah untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan bijaksana, sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Barber, 2007). Selain itu, Perubahan gaya hidup juga diperlukan, seperti mengurangi konsumsi barang yang tidak perlu dan memilih produk yang berkelanjutan.

Tujuan yang ketigabelas adalah penanganan perubahan iklim. Aktivitas manusia telah menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, ditandai dengan peningkatan suhu global dan naiknya permukaan air laut (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1992). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan strategis dan mendesak untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengembangkan kapasitas adaptasi dalam mengatasi perubahan iklim. Tujuan yang keempat belas adalah ekosistem lautan. Lautan adalah sumber daya yang memainkan peran krusial bagi kehidupan di bumi karena menyediakan makanan, mengatur iklim, dan menjadi rumah bagi berbagai macam makhluk hidup (Diz dkk., 2019). Namun, ancaman terhadap lautan semakin meningkat, termasuk polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan pemanasan global. Tujuan yang kelimabelas adalah ekosistem daratan. Hutan, sebagai bagian utama dari ekosistem daratan, memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Hutan menyediakan oksigen, air bersih, habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, serta melindungi tanah dari erosi (Bonan, 2008). Namun, hutan saat ini menghadapi ancaman seperti deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Tujuan kelimabelas ini bertujuan untuk menghentikan kerusakan hutan, memulihkan hutan yang telah rusak, dan

mengelola hutan secara lestari agar dapat terus memberikan manfaat bagi manusia dan generasi mendatang.

Tujuan yang keenambelas adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan ini bertujuan untuk membangun masyarakat di mana semua orang merasa setara dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Negara yang memiliki lembaga yang kuat dan efektif akan lebih mampu mengatasi konflik, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bolaji-Adio, 2015). Tujuan yang ketujuhbelas adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai semua tujuan SDGs, diperlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional (Bull & McNeill, 2019). Kemitraan global ini akan membantu dalam berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim (Kim, 2015). Suksesnya kemitraan ini bergantung pada adanya komitmen yang kuat, tujuan yang sama, perencanaan yang matang, serta kepercayaan timbal balik antara para mitra. Dengan demikian, tujuan ketujuhbelas ini menjadi fondasi penting untuk mencapai semua tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.

2.2 Tinjauan Empirik

Sehubung dengan penelitian ini, terdapat beberapa studi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki permasalahan yang hampir serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan:

Penelitian oleh Shi dkk. (2019) *The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects* menyoroti bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan telah berubah dari waktu ke waktu, dari penekanan

pada perlindungan sumber daya alam menjadi tujuan yang lebih menyeluruh yang mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Selain mencatat sejarah konsep ini dan menyediakan area potensial untuk penelitian di masa depan, penelitian ini juga menekankan pentingnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka kerja di seluruh dunia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurut penelitian ini, penelitian harus berkonsentrasi pada topik-topik yang mencakup dampak perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan kontribusi masyarakat sipil terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian Ayu Oktaviani Musri (2020) “Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan” menunjukkan bahwa dinas sosial telah siap untuk melaksanakan program SDGs di Kota Pekanbaru. Angka kemiskinan Kota Pekanbaru telah berhasil diturunkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengutamakan program PKH, PIP, PIS, dan BPNT di antara program-program yang telah dijalankan. Program-program tersebut telah menunjukkan capaian positif dengan penurunan angka kemiskinan di Kota Pekanbaru sebesar 11,7% pada tahun 2018, meskipun masih terdapat permasalahan dalam mekanisme distribusi bantuan yang memerlukan perbaikan sistematis.

Muh. Jefri (2021) dalam penelitiannya “Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja di Lapas Kelas I Makassar”. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis mekanisme implementasi program pemberdayaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pada akhirnya, narapidana dapat berkembang menjadi individu yang terampil dan memiliki kesempatan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Dalam hal ini, Lapas memiliki tugas untuk mengajarkan para narapidana bagaimana menjadi anggota masyarakat yang

kompeten. Diharapkan bahwa pembinaan ini akan menjadi bekal seumur hidup bagi narapidana/WBP yang telah bebas. Namun terdapat sejumlah kendala signifikan dalam mengimplementasikan program pembimbingan kerja narapidana, di antaranya kegiatan kerja yang tidak konsisten dan keterbatasan strategi pemasaran.

Louwis Firdaus Vascalis Sirait dan Padmono Wibowo (2023) dalam penelitiannya “Peranan Keterampilan WBP dalam Pembangunan” menunjukkan bahwa Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemenuhan hukuman, tetapi juga pada pengembangan potensi diri WBP. Melalui pelatihan keterampilan seperti membatik, membuat sandal, dan beternak ayam, diharapkan WBP dapat memperoleh bekal untuk hidup mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas. Selain itu, program ini juga dapat menunjang tercapainya pembangunan berkelanjutan.